



DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020



Jalan Arungbinang No.19
Kabupaten Kebumen
54311



dinsospkb.kebumenkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Gambaran Umum Organisasi

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha terencana dan melembaga yang meliputi berbagai intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi – institusi sosial. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang sifatnya pelayanan dasar yang harus dilaksanakan setiap pemerintah daerah. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang sosial yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dengan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan

sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;

4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas dan ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Adapun Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber daya manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

Table 1.1
Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	-
2	SMP	-
3	SLTA	8
4	D1-D3	1
5	S1	17
6	S2	5
JUMLAH		31

Tabel 1.2
Data pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

	Golongan												
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a
Jumlah Personil							3	5	1	3	10	7	1

Table 1.3
Data pegawai berdasarkan jenis jabatan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Struktural	20
2	Pelaksana	11
Jumlah		31

Table 1.4
SDM Menurut Jenis Kelamin

No	Unit kerja	Laki – laki	Perempuan	Total
1	Dinsos PPKB	18	13	31

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

Table 1.5
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	Tanah dan bangunan kantor permanen	Baik	11 unit
2	Bangunan gedung kantor permanen	Baik	31 unit
3	Bangunan rumah sakit jiwa	Baik	1 unit
4	Gedung pos jaga permanen	Baik	1 unit
5	Bangunan tempat kerja lainnya	Baik	15 unit
6	Tugu peringatan lainnya	Baik	3 unit
7	Electric generating set lainnya	Baik	1 unit
8	Jaket pelampung	Baik	15 pasang
9	Stasion wagon	Baik	3 unit
10	Kendaraan dinas bermotor perorangan	Baik	1 unit
11	Mini bus	Baik	4 unit
12	Sepeda motor	Baik	161 unit
13	Kendaraan bermotor khusus lainnya	Baik	2 unit

DINSOS PPKB | 2020

No	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
14	Mesin gergaji chan saw	Baik	1 unit
15	Mesin ketik manual portable	Baik	18 unit
16	Lemari besi/metal	Baik	8 unit
17	Lemari kayu	Baik	34 unit
18	Rak besi	Baik	1 unit
19	Rak kayu	Baik	23 unit
20	Filing cabinet besi	Baik	13 unit
21	Brankas	Baik	1 unit
22	Lemari kaca	Baik	25 unit
23	Papan visual / papan nama	Baik	12 unit
24	White board	Baik	24 unit
25	LCD proyektor / in focus	Baik	7 unit
26	Papan nama instansi	Baik	3 unit
27	Alat kantor lainnya	Baik	2 unit
28	Meja kerja kayu	Baik	2 unit
29	Kursi kayu	Baik	2 unit
30	Sice	Baik	6 unit
31	Sice	Kurang baik	1 unit
32	Meja rapat	Baik	12 unit
33	Meja telephone	Baik	3 unit
34	Meja ½ biro	Baik	5 unit
35	Meja ½ biro	Kurang baik	2 unit
36	Kasur/spring bed	Baik	1 unit
37	Meja makan besi	Baik	1 unit
38	Kursi rapat	Baik	110 unit
39	Kursi tamu	Baik	31 unit
40	Kursi putar	Baik	5 unit
41	Kursi putar	Kurang baik	1 unit
42	Kursi lipat	Kurang baik	1 unit
43	Meja computer	Baik	4 unit
44	Sofa	Baik	4 unit
45	Mesin pemotong rumput	Baik	1 unit
46	Mesin cuci	Kurang baik	1 unit
47	Lemari es	Baik	2 unit
48	Lemari es	Kurang baik	1 unit
49	AC	Baik	28 unit
50	Karoseri motor	Baik	10 unit
51	Kipas angin	Baik	62 unit
52	Exhourse fan	Baik	51 unit
53	Kompas gas	Baik	2 unit

DINSOS PPKB | 2020

No	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
54	Kitchen set	Kurang Baik	1 unit
55	Tabung gas	Baik	1 unit
56	Tabung gas	Kurnag baik	1 unit
57	Televisi	Baik	6 unit
58	Sound system	Baik	19 unit
59	Sound system	Kurang baik	1 unit
60	Microphone	Baik	1 unit
61	Unit power suplay	Baik	2 unit
62	Camera video	Baik	1 unit
63	Dispenser	Baik	2 unit
64	Mimbar / podium	Baik	1 unit
65	Handy cam	Baik	1 unit
66	Goryn / krey	Baik	1 unit
67	Alat rumah tangga lainnya	Baik	5 unit
68	Lampu spirt light	Baik	3 unit
69	Meja kerja pejabat eselon II	Baik	1 unit
70	Meja kerja pejabat eselon III	Baik	4 unit
71	Meja kerja pejabat eselon IV	Baik	19 unit
72	Meja kerja pegawai / non stuktural	Baik	54unit
73	Kursi tamu	Kurang Baik	1 unit
74	Lemri arsip	Kurang baik	3 unit
75	Megaphone	Baik	1 unit
76	Camera elektronik	Baik	20 unit
77	Alat pemanas prosesing	Baik	2 unit
78	Layar proyektor	Baik	6 unit
79	Telephonr	Baik	2 unit
80	HT	Baik	8 unit
81	Rig Motorola	Baik	1 unit
82	Pesawat telephone	Baik	1 unit
83	Facsimile	Baik	1 unit
84	Alat komunikasi lainnya	Baik	2 unit
85	Public addres	Kurang Baik	1 unit
86	Peralatan antenna	Baik	3 unit
87	Alat kedokteran lainnya	Baik	60 unit
88	Pc unit	Baik	30 unit
89	Pc unit	Kurang baik	6 unit
90	Laptop	Baik	49 unit
91	Notebook	Baik	50 unit
92	Notebook	Kurang baik	1 unit
93	PC tablet	Baik	1 unit

DINSOS PPKB | 2020

No	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
94	Printer	Baik	73 unit
95	Printer	Kurang baik	6 unit
96	External	Baik	1 unit
97	Router	Baik	1 unit
98	Peralatan jaringan lainnya	Baik	1 unit
99	Tenda	Baik	1 unit
100	Sepatu boot	Baik	15 pasang
101	Jaringan transmisi	Baik	2 unit

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan oraganisasi perangkat daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta Tata kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

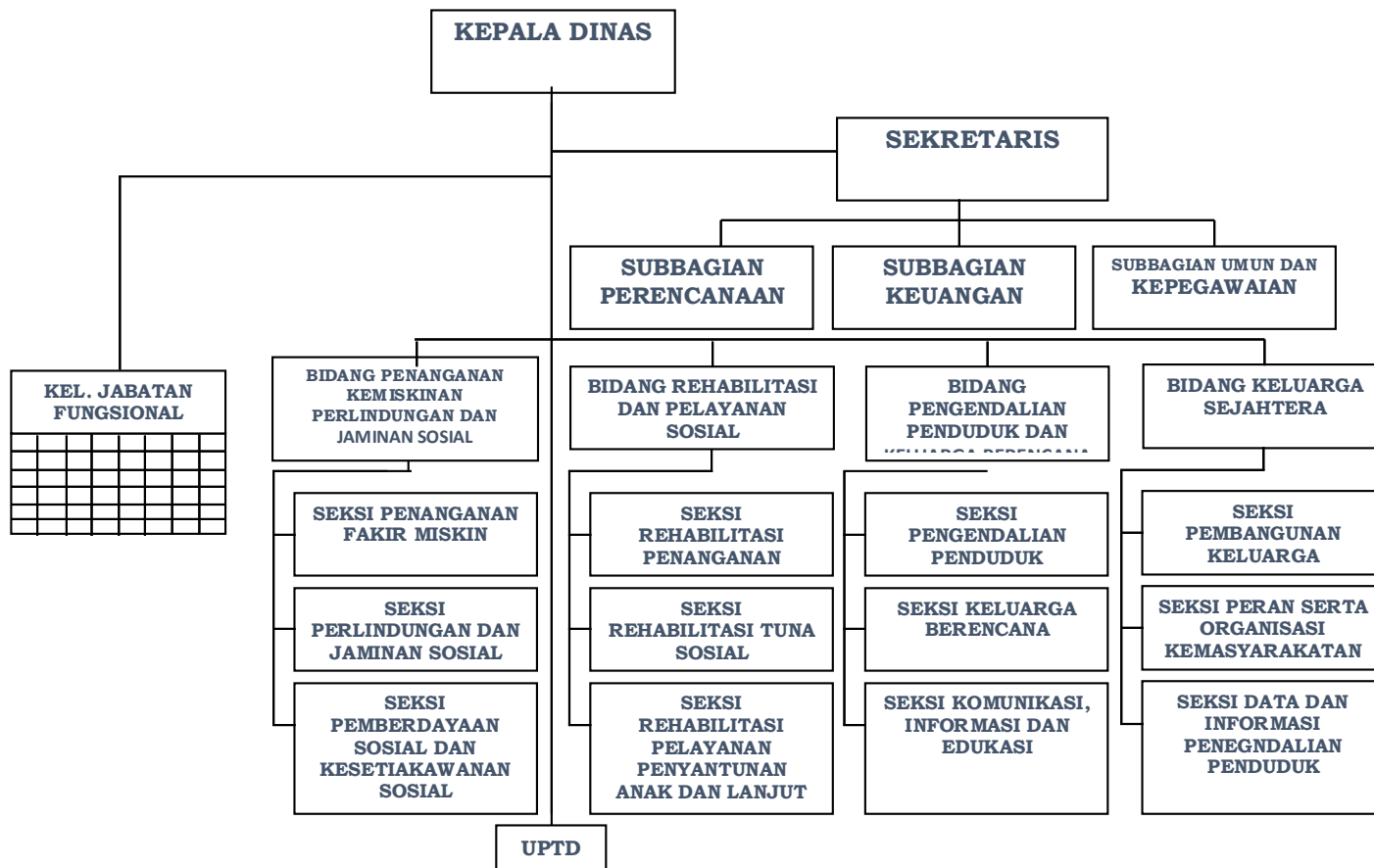
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas membawahi:
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
 - Sub bagian keuangan
 - Sub bagian Perencanaan

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris
- c. Bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial
 - Seksi penanganan fakir miskin

- Seksi perlindungan dan jaminan sosial
- Seksi pemberdayaan sosial dan kesetiakawanan
- d. Bidang Rehabilitasi dan pelayanan sosial
 - Seksi rehabilitasi penyandang disabilitas
 - Seksi rehabilitasi tuna sosial
 - Seksi rehabilitasi pelayanan, penyantunan anak dan lanjut usia
- e. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - Seksi pengendalian penduduk
 - Seksi keluarga berencana
 - Seksi komunikasi, informasi, dan edukasi
- f. Bidang keluarga sejahtera
 - Seksi pembangunan keluarga
 - Seksi peran serta organisasi kemasyarakatan
 - Seksi data dan informasi pendalian penduduk

Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

DINSOS PPKB 2020



1.2 Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : *“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”* dengan melaksanakan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melalui misi yaitu Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat dan Meningkatkan perekonomian daerah guna memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Adapun dalam penyelenggaraan urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk di kabupaten Kebumen, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan strategi :

1. Pendampingan dan perlindungan sosial;
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial;
3. Penguatan kapasitas dan motivasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS;

4. Pemberdayaan sosial dan membangun jejaring kemitraan;
5. Perlindungan dan jaminan sosial;
6. Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial;
7. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan pelayanan KB di kecamatan;
10. Cakupan pelayanan KB aktif;
11. Pemberdayaan kader kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL).

Sedangkan dalam pelaksanaan hal tersebut, kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial dan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di arahkan kepada :

1. Perlindungan sosial bagi lanjut usia dan anak terlantar di luar panti
2. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas (penyandang cacat) terlantar di luar panti
3. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pengemis dan gelandangan terlantar di luar panti
4. Pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial
5. Penguatan kapasitas PSKS guna mendukung penanganan PMKS serta meningkatkan semangat keperintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan
6. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana alam dan bencana sosial, pengerahan anggota TAGANA di lokasi bencana serta penyiapan TAGANA yang tangguh.
7. Fasilitasi koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah
8. Pemberdayaan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
9. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan, dan profesional
10. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS

Adapun kebijakan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

- 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- 2) Peningkatan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga

1.3 **Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Commented [A1]: Permasalahn DINAS

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama masih minimnya jumlah PLKB dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Integrasi penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dengan penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- c. Belum optimalnya integrasi program dan kegiatan secara menyeluruh yang berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS;
- d. Belum optimal atau belum validnya Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Sementara permasalahan utama yang dihadapi Dinsos PPKB dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Jumlah tenaga petugas Keluarga Berencana (PKB) yang tidak ideal, 1 PKB mengampu lebih dari 4 desa.
2. Belum semua pasangan usia subur (PUS) memahami program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

**BAB II
PERJANJIAN KINERJA****2.1 Perencanaan Strategis**

Rencana strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi, serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021.

a. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025, Visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 adalah:

“Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Argobisnis”

Dan dari empat Visi yang akan dilaksanakan dalam RPJPD yang meliputi: (1) mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat, (2) membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya, (3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, serta (4) memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional dan internasional demi kesejahteraan rakyat; maka misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Sosial Kabupaten Kebumen adalah Misi kedua dan Misi keempat untuk menunjang visi Bupati Kebumen yaitu:

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”

Berdasarkan Visi Bupati Kebumen maka ditetapkan Misi Bupati Kebumen

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah guna memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan

6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mendukung Misi

Dua

“Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat”

Empat

“Meningkatkan perekonomian daerah guna memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan”

Untuk mendukung visi dan misi Bupati tersebut maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

b. Tujuan

Pembentukan visi dan misi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Mengendalikan Keberdayaan Masyarakat melalui upaya peningkatan keluarga sejahtera dan peningkatan peserta KB aktif
4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
5. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta system administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

c. Sasaran

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (outcome) yakni yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PMKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS;
2. Meningkatnya penanganan penyandang cacat;
3. Meningkatnya penanganan PMKS jalanan (Wanita tuna susila, gelandangan, pengemis dan anak jalanan);
4. Meningkatnya penanganan keluarga miskin;
5. Meningkatnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial;
7. Meningkatnya penanganan lanjut usia dan anak terlantar di

- luar dan dalam panti;
8. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB;
 9. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 10. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program KB melalui, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
 11. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja OPD sesuai Renstra 2016-2021
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2020	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase (%) PMKS terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	Meningkat dan menguatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial PMKS	30%	0		10%	10%	20%	20%	20%	20%
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	70%	90%		60%	65%	70%	74%	80%	90%
4	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang KB	87%	90%		80%	82%	85%	87%	89%	89%
5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	1%		1,21%	1,24%	1,28%	1,32%	1,37%	1,37%

DINSOS PPKB | 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2020	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	65%	77%		77,65%	78,00%	78,84%	79,45%	80,75%	80,75 %
7	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	5%	5%		12%	11,15%	8,35%	6,15%	5%	5%
8	Rasio Pembina KB (PPKBD) 1 petugas setiap desa / kelurahan	1 orang	1 orang		1 org / desa	1 org/ desa	1 org/ desa	1 org/ desa	1 org/ desa	1 org/ desa
9	Rasio Petugas Lapangan KB (Penyuluh KB) satu penyuluh KB membina desa	2 desa	2 desa		6 desa	5 desa	4 desa	3 desa	2 desa	2 desa
10	Cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30 %	30 %		0,50%	1,00%	1,10%	1,85%	2,00%	2,00%
11	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	80%	90%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 berikut Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase (%) Capaian Kinerja Pelayanan perangkat Daerah	92 %
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	16,20 %
3.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Cakupan peserta KB Aktif	85,10 %
		Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	32,31%

DINSOS PPKB | 2020

Sedang Program dan Anggaran yang di kelola Dinsos PPKB adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Tahun 2020

No	Program	Anggaran		Bertambah / (berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	655.013.000	566.914.000	(88.099.000)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	208.213.000	230.213.000	22.000.000
3.	Program Keluarga Berencana	10.821.457.000	10.364.477.000	(456.980.000)
4.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	1.084.634.000	793.413.000	(291.221.000)
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	40.000.000	29.067.000	(10.933.000)
6.	Program penciptaan iklim usaha kecil Menengah yang konduksif	150.000.000	43.286.000	(106.714.000)
7.	Program Pengembanagan Data/ Informasi	55.647.000	46.612.000	(9.035.000)

DINSOS PPKB | 2020

No	Program	Anggaran		Bertambah / (berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
8.	Program Pengembanagan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	9.890.000	6.849.000	(3.041.000)
9.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	799.804.000	2.077.010.000	1.277.206.000
10.	Program Pelayanan dan Kontrasepsi	223.243.000	167.013.000	(56.230.000)
11.	Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	310.000.000	298.590.000	(11.410.000)
13.	Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial lainnya)	140.000.000	131.740.000	(8.260.000)
14.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	128.726.000	53.820.000	(74.906.000)
15.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	413.000.000	349.727.000	(63.273.000)
16.	Program Penyiapan tenaga pendampingan kelompok bina keluarga	259.260.000	237.655.000	(21.605.000)

DINSOS PPKB | 2020

No	Program	Anggaran		Bertambah / (berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
17.	Program perencanaan sosial dan budaya	1.373.925.000	1.441.018.000	67.093.000
18.	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	15.000.000	11.130.000	(3.870.000)
	TOTAL	16.687.812.000	16.848.534.000	160.722.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial dan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Agar dapat dilakukan pengukuran kinerja maka dibutuhkan data kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang

dilaksanakan berupa indikator output maupun indikator outcome yang dapat direalisasikan dari masing masing program dan kegiatan. Data kinerja dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang bersumber dari:

- Laporan Target, Realisasi Fisik dan Keuangan;
- Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020;
- Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2020;
- LKJIP Dinas Sosial dan Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020;
- Hasil wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Data terkumpul kemudian disusun dan diolah menjadi data kualitatif maupun kuantitatif dari indikator kinerja suatu sasaran strategis maupun indikator kinerja utama dari sasaran.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (tahun 2019). Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (tahun 2020) dan DPA Perubahan tahun 2020. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dan DPA Perubahan 2020.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) melalui media berupa formulir Pengukuran Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan 4 (empat) skala pengukuran dengan rumus dan kategori sebagai berikut: Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran, dimaksudkan maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

I. Capaian Kinerja tahun 2020

Sesuai dengan tupoksinya, Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program/ kegiatannya adalah untuk mendukung sasaran Meningkatkan keberdayaan masyarakat, dengan Indikator Sasaran Angka Kemiskinan.

Realisasi dan Capaian indicator kinerja angka kemiskinan tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Angka kemiskinan tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	2020			Target Akhir RPJMD	% Capaian terhadap Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kemiskinan	16,82 %	16,22 %	17,59 %	92,21 %	15,45 %	87,83 %

Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Tabel 3.3
Target Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Indikator sasaran (IKU Daerah)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kemiskinan	%	20,20	19,26	18,05	17,74	16,98	16,22	15,45

Table 3.4
Realisasi Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen tahun
2016-2021

Indikator sasaran (IKU Daerah)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kemiskinan	%	20,20	19,86	19,60	17,47	16,82	17,59	-

Grafik 3.1
Realisasi indikator kinerja utama (IKU) Daerah yang di dukung
Dinsos PPKB dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021



Untuk mendukung Indikator Angka Kemiskinan Dinsos PPKB mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yakni :

1. Cakupan Penanganan PMKS
2. Cakupan Peserta KB Aktif
3. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinsos PPKB
Tahun 2020

Indikator kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2019	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian tahun 2020
Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%	70,65	16,20	96,12	593,33
Cakupan Peserta KB aktif	%	71,41	85,10	70,60	82,96
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera	%	53,03	32,31	44,04	136,30
Rata-rata persentase capaian kinerja 2020					270,86%

Berdasarkan table 3.5 capaian kinerja tahun 2020 sebesar 270,86% atau dengan kategori sangat baik, dari ke tiga indikator kinerja rata-rata capaiannya untuk indikator kinerja :

1. Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) capaiannya 593,33%;
2. Cakupan peserta KB aktif capaiannya 82,96%;
3. Cakupan pembinaan keluarga sejahtera capaiannya 136,30%.

Dari ketiga indikator tersebut satu indikator masih belum tercapai yaitu cakupan peserta KB aktif dari target 85,10% realisasi 70,60% atau capaiannya 82,96%, hal ini disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi dari target Nasional yaitu sebesar 65%.

Untuk mencapai sasaran kinerja Cakupan penanganan PMKS Dinsos PPKB melaksanakan berbagai program/kegiatan baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten. Program yang bersumber dari APBD meliputi :

1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya;
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
5. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;

Disamping dukungan beberapa program yang dibiayai APBD Kabupaten juga adanya Jaring Pengamanan Sosial (JPS) yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid, capaian IKU Perangkat Daerah ini juga didukung adanya program pemerintah pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat terdampak Covid, serta adanya Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi.

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Cakupan Peserta KB Aktif, dilaksanakan berbagai program yakni :

1. Program penataan administrasi kependudukan;
2. Program keluarga berencana;
3. Program pelayanan kontrasepsi;
4. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;

Sedangkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Pembinaan Keluarga sejahtera dilaksanakan program :

1. Program penataan administrasi kependudukan;
2. Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
3. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Alokasi anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2020 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 20.845.710.000 terealisasi sebesar Rp 19.379.592.731, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp1.466.117.269 atau sebesar 92,96%

Program pendukung sasaran strategis antara lain :

- 1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya;
- 4) program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- 5) program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- 6) program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- 7) program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- 8) program penataan administrasi kependudukan;
- 9) program keluarga berencana;
- 10) program pelayanan kontrasepsi;
- 11) program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- 12) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, antara lain:

1. Pemutakhiran Data Kemiskinan yang belum optimal;
2. Belum maksimalnya penerima manfaat memanfaatkan program dan bantuan yang diberikan;
3. Belum adanya fasilitas permodalan bagi kelompok UPPKS;
4. Drop Out dan Unmetneed peserta KB yang masih tinggi.

Solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan

- 1) Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan mengoptimalkan peran SDM Kesejahteraan Sosial dan Desa.
- 2) Pemberdayaan penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan;
- 3) Membantu kelompok UPPKS dalam pemasaran produk;
- 4) KB paska persalinan dan paska keguguran untuk bisa dimaksimalkan;
- 5) Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipertajam melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak, KIE perorangan dan kelompok serta media sosial lainnya.

Upaya untuk mencapai target akhir Renstra

- 1) Pemutakhiran Data Kemiskinan;
- 2) Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS terlantar;
- 3) Pemutakhiran data keluarga Indonesia;
- 4) Bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pelayanan KB terutama KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- 5) Memperkuat KIE.

1. Perbandingan capaian kinerja Cakupan Penanganan PMKS tahun 2019 dan 2020

Tabel 3.6

Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui cakupan penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2019 dibanding dengan tahun 2020

Indikator kinerja	Satuan	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian kinerja
Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%	16,16	70,65	16,20	96,12	593,33

Capaian Indikator Kinerja meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Cakupan Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2019 dibanding dengan tahun 2020 memperoleh capaian kinerja 593,33%. Pada tahun 2019 dengan target 16,16% terealisasi sebesar 70,65% dan pada tahun 2020 dengan target 16,20% terealisasi sebesar 96,12%.

Angka ini diperoleh dari jumlah PMKS yang ditangani Sejumlah 615.792 jiwa dibagi jumlah PMKS dalam DTKS sejumlah 640.654 jiwa. Kenaikan capaian kinerja ini disebabkan adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai bagi 506.688 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program pemberdayaan Fakir miskin melalui KUBE sebanyak 550 KUBE (550 KK), penyandang eks penyakit sosial sebanyak 50 jiwa, program bantuan untuk lanjut usia sebanyak 6.272 jiwa, bantuan untuk anak terlantar 1.155 jiwa, bantuan untuk orang kehabisan bekal 86 jiwa, bantuan permakanan untuk Rusi Dosaraso 120 jiwa, bantuan untuk penyandang

Disabilitas sebanyak 645 jiwa, penanganan bayi terlantar sebanyak 3 jiwa, bantuan untuk ABH (anak berhadapan dengan hukum) sebanyak 73 jiwa, bantuan untuk penanganan korban bencana kebakaran dan alam sebanyak 10.227, bantuan untuk korban covid-19 87.987 jiwa dan bantuan logistic darurat covid-19 untuk 1.936 jiwa.

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS. Adapun rincian Jumlah PMKS di Kabupaten Kebumen yang mendapatkan pelayanan sosial dari Dinsos PPKB adalah sebagai berikut :

Table 3.7
Data Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen Tahun 2020

DATA PMKS PENERIMA LAYANAN		
Kube tawon madu klanceng	50	DTKS (Ruta)
KUBE APBN	500	
Eks penyandang penyakit sosial	50	
Lanjut usia APBD	6.222	
Anak terlantar	130	
Anak terlantar APBN	500	
Anak terlantar APBD Prov	525	

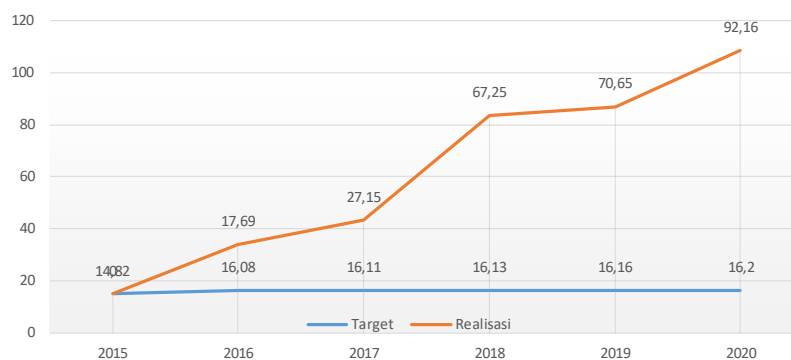
DATA PMKS PENERIMA LAYANAN		
Orang kehabisan bekal	86	
Rusi dosaraso	130	
Disabilitas	420	
Respon kasus disabilitas	8	
Bayi terlantar	3	
Anak berhadapa dengan hukum (ABH)	73	
Sembako disabilitas (APBN)	136	
Sembako dari CSR (PLN)	78	
Pengiriman PM ke BBRSPDF Surakarta	2	
Pengiriman PM ke Temanggung Penganti (Tuna Netra)	1	
Korban bencana kebakaran dan alam	10.227	
BPNT	506.688	
JPS Provinsi	43.385	
JPS Kabupaten	18.762	
BST tahan 9	25.840	
Logistik darurat covid	1.936	
Jumlah	615.792	640.654

Sumber : DINSOS PPKB Kab. Kebumen, 2020

Dari data diatas dapat diketahui jenis data DTKS (Rumah Tangga) mencapai 640.654 dan data PMKS Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mendapatkan bantuan sejumlah 615.792. Kinerja urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen teralisasi 96,12%, sehingga capaian indikator kinerja Cakupan

Penanganan PMKS sebesar 593,33. Hal ini disebabkan adanya program nasional Bantun Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako, Program PKH dan program penanganan PMKS lain baik yang bersumber dana APBN, APBD Prov maupun APBD Kabupaten.

Grafik 3.2
Grafik Cakupan Penanganan PMKS



2. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.8

Realisasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka mendukung indikator cakupan penanganan PMKS tahun 2020

Program /kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	793.413.000	768.368.188	96,84
Peningkatan kemampuan (CB) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	208.935.000	201.953.118	96,66
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	446.677.000	436.654.120	97,76
Pelatihan ketrampilan bagi	137.801.000	129.760.950	94,17

DINSOS PPKB | 2020

Program /kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
penyandang masalah kesejahteraan sosial			
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	2.077.010.000	2.065.613.734	99,45
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	154.178.000	154.167.968	99,99
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana	1.541.078.000	1.535.497.324	99,64
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	376.148.000	370.361.642	98,46
Pendataan PMKS dan PSKS	5.606.000	5.586.800	99,66
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	298.590.000	294.518.237	98,64
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks truma	298.590.000	294.518.237	98,64
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyankit sosial lainnya)	131.740.000	129.015.588	97,93
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	131.740.000	129.015.588	97,93
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	349.727.000	349.247.700	99,86
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	16.523.000	16.398.100	99,24

DINSOS PPKB | 2020

Program /kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	333.204.000	332.849.600	99,89
TOTAL ANGGARAN	3.650.480.000	3.604.763.447	98,74

Berdasarkan table 3.5 cakupan penanganan PMKS di tahun 2020 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 3.650.480.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.604.763.447,- atau 98,74% terjadi efisien anggaran sebesar Rp 45.716.553,-. Karena target telah tercapai. Efisien anggaran diperoleh dari sisa pagu kontrak, perjalanan dinas, dan BBM.

3. Analisis Program dan kegiatan

Tabel 3.9
Hasil pengukuran cakupan kinerja meningkatnya
keberdayaan masyarakat melalui penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

No	Program	Realisasi tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas \ adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	64.661 KPM	615.792 KPM	615.792	100%
2	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	315 orang	1.160 orang	1.160 orang	100%
3	Program pembinaan penyandang	400 orang	287 orang	287 orang	100%

DINSOS PPKB | 2020

No	Program	Realisasi tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% capaian
	cacat dan trauma				
4	Program pembinaan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	70 orang	50 orang	50 orang	100%
5	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	132 orang	86 orang	86 orang	100 %

Berdasarkan tabel 3.9 Cakupan Penanganan PMKS ditahun 2020 mendapatkan dukungan anggaran dari 5 program : 1. Pogram Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS) lainnya, 2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social, 3. Program pembinaan penyandang cacat dan trauma, 4. Program pembinaan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya), 5. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social. Dari 5 program yang mendukung penanganan PMKS semuanya mencapai target 100%, sangat baik.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Peserta KB Aktif tahun 2019 dan 2020

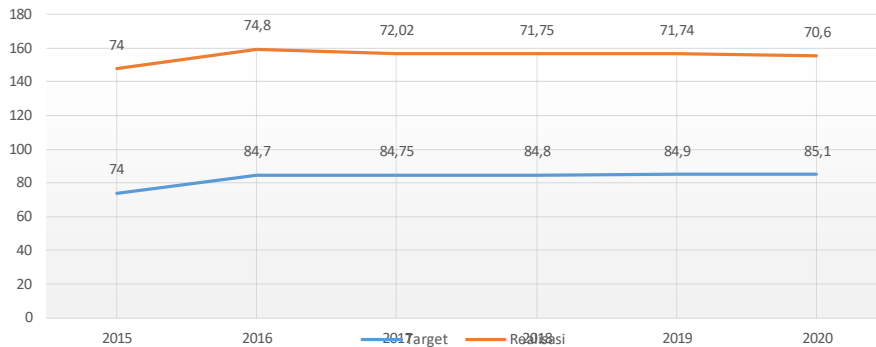
Tabel 3.10

Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui cakupan peserta KB aktif tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020

Indikator kinerja	satuan	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian
Persentase cakupan peserta KB aktif	%	84,90	71,41	85,10	70,60	82,96

Capaian Indikator Kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui persentase cakupan peserta KB aktif tahun 2020 menunjukkan memperoleh capaian angka 82,96%, pada tahun 2019 dengan target 84,90% dengan realisasi 71,41% sedangkan target tahun 2020 sebesar 85,10% dengan realisasi 70,60%. Indikator kinerja ini tidak tercapai karena kesalahan pentargetan di awal tahun Rentra. Pentargetan melampaui target Nasional, dimana tahun 2020 ini hanya 65 % jika dibanding dengan target nasional kita sudah melampaui target.

Grafik 3.3
Grafik Cakupan Peserta Kb Aktif



5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Table 3.11
Realisasi anggaran cakupan peserta KB aktif
(Indikator kinerja utama (IKU) Dinsos PPKB kabupaten Kebumen yang mendukung IKU Daerah dalam RPJMD 2016-2021)

Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program pelayanan kontrasepsi	167.013.000	137.593.347	82,38
Pelayanan pemasangan kontrasepsi	167.013.000	137.593.347	82,38
Program keluarga berencana	10.364.477.000	9.550.031.292	92,14
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	2.849.869.000	2.432.821.123	85,37%
Pelayanan KIE	156.215.000	152.904.300	97,88%
Pembinaan petugas keluarga berencana	4.015.677.000	3.994.516.942	99,47%
Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)	1.203.600.000	1.014.745.927	84,31%
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	2.139.116.000	1.955.043.000	91,39%
Total Anggaran	10.531.490.000	9.687.624.639	87,26%

Berdasarkan Tabel 3.10 cakupan peserta KB aktif tahun 2020 mendapat alokasi dana sebesar Rp 10.531.490.000,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp 9.687.624.639,- atau 87,26% terjadi efisiensi anggaran sebesar 843.865.361,-. Karena target telah tercapai, efisiensi diperoleh dari sisa pagu kontrak, perjalanan dinas dan BBM.

6. Analisis Capaian Program dan Kegiatan

Capaian program pembangunan daerah yang berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

N o	Nama program / indicator kinerja	Target kinerja akhir periode RPJMD	Target kinerja tahun 2020	Realisasi kinerja tahun 2020	OPD penanggu ngjawab
1	Program keluarga berencana				
a	Peningkatan pelayanan KB di kecamatan	100	71,42	70,60	Dinsos ppkb
2	Program Pelayanan Kontrasepsi				
b	Cakupan pelayanan KB aktif	85,50	85,10	70,60	Dinsos ppkb

Dari tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran urusan Meningkatnya keberdayaan masyarakat. Secara umum hamper semua indikator kinerja

program yang melekat di Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen ditahun 2020 dapat terealisasi. Sedangkan yang tidak mencapai target adalah program keluarga berencana, adapun penyebab masalahnya adalah jumlah personil tenaga Penyuluh Keluarga Berencana yang tidak ideal, 1 Penyuluh KB mengampu 4 Desa. Dan belum semua pasangan usia subur (PUS) memahami program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut terlihat dari capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana.

7. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan pembinaan Keluarga Sejahtera tahun 2019 dan 2020

Untuk mencapai Kinerja sasaran, Dinas Sosial PPKB menetapkan indikator kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan KB dengan target dan capaian sebagai berikut :

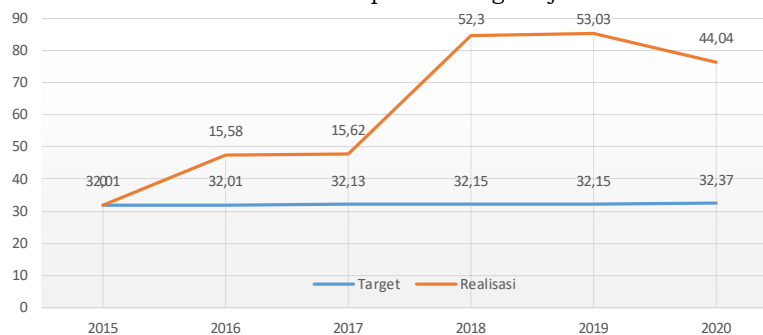
Tabel 3.13
Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020

Indikator kinerja	satuan	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian 2020
Persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera	%	32,15	53,02	32,31	44,04	136,30

Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera tahun 2020 memperoleh capaian 136,30%. Pada tahun 2019 dengan target 32,15% dapat mencapai realisasi sebesar 53,02% sedangkan di tahun 2020 dengan target 32,31% terealisasi

44,04%. Realisasi capaian kinerja sebesar 136,30% di peroleh dari jumlah PUS anggota poktan keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang ber KB di bagi jumlah PUS anggota poktan keluarga prasejahtera dan sejahtera I di kali 100%.

Grafik 3.4
Cakupan Keluarga Sejahtera



Tabel 3.14
Realisasi anggaran cakupan keluarga sejahtera
(Indicator kinerja utama (IKU) Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen yang mendukung IKU Daerah dalam RPJMD 2016-2021)

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program penataan administrasi kependudukan	29.067.000	27.613.000	95%
Pengembangan data base kependudukan	29.067.000	27.613.000	95%
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	43.286.000	41.361.000	95,55%
Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	43.286.000	41.361.000	95,55%
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	237.655.000	230.752.000	97,10%
Pemberdayaan BKB, BKR, BKL dan Bina lembaga keluarga	237.655.000	230.752.000	97,10%
Total anggaran	310.000.000	299.726.000	96,68%

Berdasarkan tabel 3.13 cakupan keluarga sejahtera tahun 2020 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 310.000.000,- dan

realisasi anggaran sebesar Rp 299.726.000,- atau sebesar 95,88% terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 10.274.000,-. Karena target sudah tercapai, efisiensi sebesar 3,32%.

9. Capaian kinerja urusan

Untuk mencapai Kinerja sasaran, Dinas Sosial PPKB menetapkan indikator kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan KB dengan target dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Kebumen Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA 2020		TARGET AKHIR RPJMD
			T	R	
1. Cakupan peserta KB aktif	%	71,41	85,10	70,60	85,90
2. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	%	53,02	32,37	44,04	32,27

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat salah satunya melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Penyelenggaraan Program KB selain ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan terutama dalam pelayanan KB adalah dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan kontrasepsi, kemudahan dalam pelayanan informasi, advokasi serta pendampingan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi.

Capaian kinerja tahunan cakupan Peserta KB Aktif tahun 2020 sebesar angka 82,96 %. Realisasi 2020 sebesar 70,60% diperoleh dari jumlah peserta KB aktif sebesar 137.183 jiwa dibagi jumlah PUS sebesar 194,309 jiwa dikali 100%. Realisasi tahun 2020 tidak mencapai target karena target yang ditetapkan terlalu tinggi yaitu sebesar 85,10%, sedangkan target Nasional sebesar 65%. Adapun perkembangan cakupan peserta KB aktif, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2020

NO.	URAIAN KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,7	2,7	3	2,3	2,3
2.	Jumlah akseptor KB	155.134	155.134	154.502	141.693	141.808	137.676
	a. Laki-Laki	5.115	5.115	5.455	5.017	5.847	5.618
	b. Perempuan	150.019	150.019	149.047	136.676	135.961	132.058
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	214.553	208.841	206.543	199.509	198.315	199.214
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	155.134	155.134	154.502	142.389	141.441	137.183

Sumber : DINSOS PPKB Kab. Kebumen, 2020

Dengan bertambahnya peserta KB aktif diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan dapat mengentaskan kemiskinan.

2. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Capaian kinerja cakupan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar angka 136,05%. Atau dengan kata lain Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 44,04% sementara target yang ditetapkan 32,37%. Persentase ini

dihitung dari jumlah PUS anggota poktan keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang ber KB dibagi jumlah PUS anggota poktan keluarga prasejahtera dan sejahtera I di kali 100%. Target kinerja ini tercapai melalui program tenaga pendamping kelompok BKB (Bina Keluarga Balita, BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan program usaha kecil menengah kegiatan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

Table 3.17
Rekapitulasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen
Tahun 2020

NO	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH
1.	Tahapan Keluarga Pra Sejahtera	49.006
2.	Tahapan Keluarga Sejahtera I	218.000
3.	Tahapan Keluarga Sejahtera II	100.960
4.	Tahapan Keluarga Sejahtera III	-
5.	Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus	-
	Total	367.966

Sumber : DINSOS PPKB Kab. Kebumen 2020

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain:

➤ Permasalahan

- 1) Komposisi jumlah PLKB dan jumlah desa binaan yang tiak sebanding dengan promosi 1 PLKB mengampu 9 Desa yang seharusnya dengan perbandingan 1 PLKB mengampung 3-4 desa;
- 2) Belum semua PUS (pasangan usia subur) memahami program JKN sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan KB;

- 3) Sebagian besar masyarakat masih mengharapkan program KB dilaksanakan gratis;
- 4) Belum adanya produk hukum terkait dukungan anggaran kampung KB;
- 5) Belum maksimalnya advokasi kepada lintas sektor terkait, pemangku kepentingan terkait dengan pengalokasian anggaran guna mendukung kampung KB;
- 6) Kurangnya tenaga PLKB saat ini hanya ada 50 orang PLKB menangani 460 desa;
- 7) Terbatasnya SDM kader, banyak kader yang sudah tua dan gagap teknologi.
- 8) Terkendalanya pertemuan-pertemuan di wilayah karena adanya pandemi Covid-19

Solusi yang ditempuh di tahun 2020 untuk penanganan hambatan yaitu:

➤ Solusi

- 1) Adanya basis data kependudukan dan KB guna penyusunan kebijakan kependudukan dan KB;
- 2) Memberdayakan kader PPKBD dan sub PPKBD guna menggerakkan masyarakat ikut KB mensosialisasikan program JKN pada masyarakat khususnya calon peserta KB;
- 3) Perlu adanya penyusunan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pelayanan KB dilaksanakan secara gratis;
- 4) Penyusunan tahapan perencanaan, pelaksanaan pengembangan kampung KB di masing – masing lokasi kampung KB di 26 kecamatan. Pemetaan, analisa masalah, sinkronisasi data dan validasi data guna mendukung perumusan kebijakan kependudukan dan KB;
- 5) Mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
- 6) Mengusulkan penambahan PLKB ke BKKBN;
- 7) Melakukan peremajaan kader PPKBD sebanyak 460 dan sub PPKBD sebanyak 2.187;
- 8) Pembinaan terhadap kader institusi masyarakat pedesaan;
- 9) Peningkatan kualitas hidup manusia melalui kelompok UPPKS dengan jumlah sampai dengan tahun 2020 sebanyak 508 kelompok yang tersebar di 26 kecamatan;

- 10) Adanya penjadwalan dan pembagian pertemuan-pertemuan di wilayah, dan tetap menjaga protokol kesehatan.
- 11) Dilakukan verifikasi dan validasi data terpadu antara data DTKS, data PMKS dengan mengoptimalkan peran TKSK, PKH, dan kader PPKBD dan sub PPKBD.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 20.845.710.000,- (dua puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Jumlah ini menurun dari alokasi anggaran belanja untuk tahun 2019 sebesar Rp 34.573.211.000,- atau dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 13.727.501.000,-

Tabel 3.18
Perbandingan alokasi anggaran belanja Tahun anggaran 2019 dengan Tahun anggaran 2020

Uraian	TA.2019	TA.2020	Kenaikan/penurunan	%
Belanja				
Belanja tidak langsung	7.127.564.000	4.908.423.000	(2.219.141.000)	(68,86)
Belanja langsung	27.445.647.000	15.937.287.000	(11.508.360.000)	(58,06)

3.3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran. Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp 20.845.710.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 19.379.592.731,- (92,96%). Dari target belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp 4.908.423.000,-, terealisasi sebesar Rp

DINSOS PPKB | 2020

4.376.680.975 (89,16%), dan sedangkan Belanja langsung (BL) Rp 15.937.287.000,- terealisasi sebesar Rp 15.002.911.756 (94,13%).

Tabel 3.19
Ikhtisar Realisasi Keuangan tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja tidak langsung	4.908.423.000	4.376.680.975	89,16
	a. Belanja pegawai	4.908.423.000	4.376.680.975	89,16
2	Belanja langsung	15.937.287.000	15.002.911.756	94,13
	a. Belanja barang	14.610.675.000	13.828.522.629	94,64
	b. Belanja peralatan dan mesin	1.326.612.000	1.174.389.127	88,52
	Jumlah Belanja SKPD	20.845.710.000	19.379.592.731	92,96

Berdasarkan realisasi tersebut diatas, Belanja Tidak Langsung dari pagu anggaran Rp 4.908.423.000,- terserap sebesar Rp 4.376.680.975,- atau 89,16%. Sedangkan untuk Belanja Langsung dari pagu anggaran sebesar Rp 15.937.287.000,- terserap sebesar Rp 15.002.911.756,- atau 94,13%. Penyerapan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 19.379.592.731,- atau 92,96%, Sangat Baik.

Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran pada belanja langsung untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2020.

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	566.914.00	515.869.666	91,00%

DINSOS PPKB | 2020

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisa si
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	230.213.000	215.344.275	93,54%
3.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	793.413.000	768.368.000	96,84%
4.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	2.077.010.000	2.065.613.734	99,45%
5.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	298.590.000	294.518.237	98,64%
7.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	131.740.000	129.015.588	97,93%
8.	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	349.727.000	349.247.700	99,86%
9.	Program penataan administrasi	29.067.000	27.613.000	95,00%

DINSOS PPKB | 2020

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisa si
	kependudukan			
10.	Program keluarga berencana	10.364.477.000	9.550.031.292	92,14%
11.	Program pelayanan kontrasepsi	167.013.000	137.593.347	82,38%
12.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	53.820.000	52.060.100	96,73%
13.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	237.655.000	230.752.000	97,10%
14.	Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	43.286.000	41.361.000	95,55%
15.	Program pengembangan data/informasi /statistic	6.849.000	6.831.800	99,75%
16.	Program pengembangan data/ informasi	46.612.000	45.800.500	98,26%
17.	Program perencanaan sosial dan budaya	1.441.018.000	1.433.928.129	99,51%
18.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	11.130.000	8.570.200	77,00%

Adapun penyumbang rendahnya penyerapan anggaran adalah Program Pelayanan Kontrasepsi pada kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB yang persentase penyerapannya 83,38%, dikarenakan adanya pelayanan MOW dan MOP di rumah sakit di batasi adanya pandemi Covid-19, kegiatan ini banyak melibatkan masyarakat dalam bentuk pertemuan-pertemuan. Dan pada masa pandemic covid-19 ini, kegiatan pertemuan tersebut di batasi.

3.4 Capaian Kinerja Keuangan

Secara umum jika dibandingkan dengan pencapaian target tahun anggaran 2019, maka pencapaian target penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2019, realisasi penyerapan anggaran mencapai 82,22% dan pada tahun anggaran 2020 menjadi 92,96% mengalami kenaikan sebesar 10,74%.

**BAB IV
PENUTUP****4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini dilaksanakan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dan bidang Keluarga Berencana pada masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial agar dilaksanakan secara optimal sebagaimana dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan berbagai uraian dan beberapa data yang telah disampaikan, maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik.

- 1) Pencapaian indikator kinerja utama daerah (IKU Daerah), indikator angka kemiskinan belum mencapai target tetapi pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Kebumen mencapai 17,59% dari target 16,98%, (naik 0,77% dari tahun 2019 sebesar 16,82%)
- 2) Evaluasi kinerja keuangan dari 17 Program 43 kegiatan sebesar 94,21% masuk dalam kategori pencapaian 90-99,99%, sedangkan 5,79% masuk dalam kategori pencapaian kurang dari <90%

- 3) Total penyerapan anggaran APBD Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar Rp 19.379.592.731,- atau 92,96% dari total APBD sebesar Rp 20.845.710.000,-, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 28.424.871.293 atau 82,22% mengalami kenaikan sebesar 10,74%.

4.2 PERMASALAHAN / KENDALA

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tusi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial tentunya dijumpai berbagai macam permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2020, antara lain:

- 1) Data DTKS yang belum valid;
- 2) Komposisi jumlah PLKB dan jumlah desa binaan yang tidak sebanding, rata-rata 1 PLKB mengampu 9 Desa yang seharusnya dengan perbandingan 1 PLKB mengampu 3-4 desa, 50 petugas PLKB mengampu 460 Desa;
- 3) Belum semua PUS (Pasangan Usia Subur) memahami program JKN sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan KB

4.3 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa mendatang antara lain :

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);

- 2) Guna optimalkan program gulkin dilaksanakan pemberian bantuan sesuai data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- 3) Adanya data base kependudukan dan KB guna penyusunan kebijakan kependudukan dan KB;
- 4) Memberdayakan kader PPKBD dan sub PPKBD guna menggerakkan masyarakat ikut KB mensosialisasikan program JKN pada masyarakat khususnya calon peserta KB;
- 5) Penyusunan tahapan perencanaan, pelaksanaan pengembangan kampung KB dimasing-masing lokasi kampung KB di 26 Kecamatan. Pemetaan analisa masalah sinkronisasi data dan validasi data guna mendukung perumusan kebijakan kependudukan dan KB;
- 6) Mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
- 7) Mengusulkan penambahan PLKB ke BBKBN.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah tahun 2020 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penilaian kinerja yang akan datang.

Kebumen, Januari 2021

Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001